

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)

###### 1. Pengertian E-Commerce

Menurut Adi Nugroho, *electronic commerce (e-commerce)* merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web (www)* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet<sup>1</sup>

Menurut Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *elektronik commerce* atau disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactur*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet<sup>2</sup>

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Adi Nugroho, *Loc.cit*

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Loc.cit*

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Loc.cit*

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah kegiatan membeli atau menjual suatu barang atau jasa secara elektronik yang dilakukan melalui jaringan internet. *E-commerce* ini didasarkan atas kebutuhan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

## 2. Jenis - Jenis Transaksi Dalam E-Commerce

Transaksi *e-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Jenis *e-commerce* yang berkembang pesat di Indonesia ada 2 yaitu *Business to Consumer* (B2C) dan *Consumer to Consumer* (C2C).

### a. *Business to Consumer* (B2C)

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat. Contoh B2C yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia misalnya Zalora.co.id, Lazada.co.id, Berrybenka.com, dan lain-lain.

### b. *Consumer to Consumer* (C2C).

Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang. Contoh C2C yang sering

dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu Olx.co.id, Elevenia.co.id, Bukalapak.com Tokopedia.com.

Semua toko *online* tersebut telah mendapatkan ijin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan *e-commerce*. Ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana pasal 24 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Perdagangan yang berbunyi : “pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik harus mentaati ketentuan pasal 65 ayat 6 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

### **3. Pihak-Pihak Dalam E-Commerce**

Edmon Makarim menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik antara lain:<sup>4</sup>

- a. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
- b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku.

---

<sup>4</sup> Edmon Makarim, *Loc.cit*

- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank
- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. *Provider* merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini.

Kemudahan dalam melakukan transaksi *e-commerce* memungkinkan bagi pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka (*face to face*) sebagaimana dalam transaksi jual beli konvensional. Cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun (pasal 330 KUHPdata).dan telah menikah, serta tidak di bawah pengampuan.

Apabila transaksi ini dilakukan melalui media website toko *online* dengan jenis *Business to Consumer* (B2C), lazada.co.id, zalora.co.id, elevenia.co.id dan lain sebagainya. Pada jenis B2C ini, pihak penjual sebagai perusahaan *e-commerce* besar di Indonesia telah menyertakan profil

usaha dengan jelas dan lengkap sehingga mendapatkan kepercayaan dari pihak pembeli. Dalam melakukan transaksi jenis ini, pihak pembeli diharuskan membuat akun data diri seperti nama, tanggal lahir, alamat *e-mail*, nomor telepon sebagai pengenalan identitas diri kepada pihak penjual sehingga identitas dari pihak pembeli lebih jelas dan transparan.

Jenis *e-commerce* yang lainnya yaitu *e-commerce* yang dilakukan oleh sesama konsumen yang disebut *Consumer to Consumer (C2C)*. *E-commerce* C2C yang populer di masyarakat Indonesia misalnya, *Olx.co.id*, *Elevenia.co.id*, *Bukalapak.com* *Tokopedia.com*. Pada jenis ini, Perusahaan C2C tersebut bertindak sebagai “perantara” untuk menghubungkan pihak konsumen dengan konsumen lainnya untuk melakukan transaksi *e-commerce*. Dalam melakukan transaksi ini semua pihak diharuskan menyertakan data diri secara jelas dan lengkap.

Unsur kecapan dalam *e-commerce* sendiri menurut penulis sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 UU ITE. Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang masih di bawah umur dapat melakukan *e-commerce* dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan di pengadilan

#### **4. Proses Transaksi E-Commerce**

Agar sebuah perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan, maka harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi *e-commerce* yang

mengikuti ketentuan undang-undang mencakup tahap-tahap sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. *Show*. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya.
- b. *Register*. Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login.
- c. *Order*. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen pun selanjutnya melakukan order pembelian.
- d. *Payment*. Konsumen melakukan pembayaran.
- e. *Verification*. Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran (No. rekening atau kartu kredit).
- f. *Deliver*. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke konsumen.

Selain itu ada juga transaksi *e-commerce* yang prosesnya tidak mengikuti ketentuan undang-undang. Proses transaksi dalam *e-commerce* ini lebih sederhana, yaitu:

- a. *Show*

Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, namun tidak dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Situs yang digunakan oleh penjual tersebut biasanya merupakan website abal-abal yang tidak berbasis *e-commerce* resmi. Pada tahap ini penjual hanya menampilkan obyek (barang dan/atau jasa) dan disertai kontak

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Loc.cit*

untuk komunikasi, misalnya Nomor Handphone, BlackBerryMessenger (BBM), WhatsApp, Line.

b. *Order*

Setelah pembeli memilih produk yang diinginkan, pada tahap ini pembeli akan berkomunikasi dengan pihak penjual untuk melakukan pemesanan.

c. *Payment & Delivery*

Pada tahap ini biasanya terdapat 2 pilihan untuk melakukan pembayaran yaitu:

1. Pembayaran melalui transfer bank, bisa melalui transfer Anjungan Tunai Mandiri (ATM), transfer melalui Bank *Online* seperti Internet Banking Mandiri, BCA KlikPay, dan lain-lain. Setelah pembeli melakukan pembayaran dan penjual menerima pembayaran tersebut, maka penjual akan mengirimkan barang pesanan pembeli tersebut.
2. Pembayaran Di Tempat atau biasa disebut *Cash On Delivery* (COD) yaitu pembayaran yang dilakukan di tempat yang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Pada tahap ini penjual dan pembeli akan bertemu, penjual akan menyerahkan barang yang dipesan, sedangkan pembeli akan membayar barang sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Pihak penjual yang menawarkan obyek transaksi *e-commerce* tersebut merupakan pihak penjual yang tidak memiliki ijin dari Menteri. Pihak

penjual ini tidak memenuhi ketentuan pasal 65 ayat (1) UU Perdagangan yaitu “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar” dan pasal 9 UU ITE yaitu “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”, serta pasal 49 ayat (1) PP PSTE yaitu “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Contoh obyek jual beli yang melanggar ketentuan undang-undang yang telah terjadi menurut penulis seperti menjual satwa langka, brownis ganja, perdagangan bayi, prostitusi *online* yang termasuk perdagangan manusia (*human trafficking*), dan lain-lain.

#### **B. Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-Undang Dalam Perspektif Hukum**

Dewasa ini, proses pembangunan yang terus menerus dilakukan merupakan salah satu konsekuensi dari eksistensi Indonesia sebagai Negara berkembang. Segala bentuk aktivitas pembangunan diharapkan dapat berjalan dalam korido yang tepat, sehingga tujuan pembangunan yaitu tercapainya masyarakat adil, makmur, material dan spiritual dapat segera terwujud. Tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat dengan kemajuan teknologi informasi muncul tiga kemungkinan, yaitu hukum yang akan



dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, hukum mempengaruhi perkembangan teknologi, hukum dan teknologi akan saling mempengaruhi (bersinergi).

Pembangunan dalam suatu negara merupakan keharusan pemerintah untuk bersaing dengan negara lain, karena pembangunan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)<sup>6</sup>. Di negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan yang terencana dan teratur sangat penting untuk dilakukan, pembangunan ini mencakup hukum, ekonomi, intelektual, dan teknologi.

Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui internet. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet ini sudah dilakukan oleh banyak orang yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*e-commerce*).

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan nilai transaksi di Industri *e-commerce* tahun 2016 terbilang cukup agresif dengan transaksi yang ditaksir mencapai Rp394 Triliun<sup>7</sup>. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa *e-commerce* di Indonesia berjalan sangat pesat dan menarik para pelaku usaha untuk melakukan transaksi ini.

---

<sup>6</sup> Sondang P Siagian, 2005, *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 9

<sup>7</sup> Hani Nur Fajrina, *Transaksi E-commerce Indonesia di 2016 Ditaksir Rp394 Triliun*, <http://www.cnnindonesia.com>, Diakses tanggal 18 Januari 2017

Transaksi jual beli melalui sistem elektronik yang dikenal dengan *e-commerce* ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu. Proses tawar menawar sampai dengan kesepakatan harga dan jenis barang cukup dengan komunikasi jarak jauh, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa membutuhkan tatap muka (*face to face*) antara para pihak, sehingga transaksi ini tidak hanya terbatas ruang dan waktu. Pada dasarnya, para pihak dalam transaksi jual beli ini didasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik.

Berkat perkembangan teknologi tersebut, dalam dunia bisnis berkembang pula jenis-jenis barang yang dilarang peraturan perundang-undangan tidak luput diperjualbelikan. Barang terlarang yang diperjualbelikan secara bebas seperti satwa langka, narkoba, perdagangan orang. Kemudahan untuk bertransaksi secara online tersebut dimanfaatkan untuk perdagangan satwa langka yang dilindungi oleh hukum, peredaran narkoba melalui sistem elektronik menjadi faktor utama para pengedar untuk bertransaksi secara bebas dengan pembeli barang haram tersebut, selain itu transaksi melalui sistem elektronik sebagai sarana yang efektif pula terhadap perdagangan orang. Berbagai modus yang digunakan melalui media sosial untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi korban.

Pembahasan mengenai transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) yang obyeknya dilarang oleh undang-undang dalam perspektif hukum akan dijelaskan sebagai berikut:

# **1. Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-Undang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Hukum positif Indonesia telah mengatur perjanjian jual beli yaitu diatur dalam BAB V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

R. Subekti mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut<sup>8</sup>. Dari definisi tersebut (jual beli) ada dua pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban yaitu pihak penjual berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek hubungan hukum dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.

Ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Selanjutnya Pasal 1234 KUH Perdata dikatakan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Jual beli merupakan perjanjian yang timbul dikarenakan adanya

---

<sup>8</sup> R. Subekti, *Loc.cit*

hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara 2 (dua) pihak atau lebih. Pihak (subyek) jual beli sama dengan subyek hukum pada umumnya yaitu manusia (*person*) dan badan hukum (*recht person*). Tetapi tidak semua orang dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur pasal 433 KUHPerdota dan pasal 1330. Dengan demikian subyek jual beli harus memenuhi ketentuan sebagai subyek hukum untuk dapat melakukan perjanjian jual beli.

Berdasarkan pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdota yang menjadi obyek perjanjian jual beli adalah benda (*zaak*). Sedangkan pasal 1332 KUHPerdota mengatur pokok perjanjian itu adalah hanya barang-barang yang dapat diperjualbelikan. Menurut pasal 499 KUHPerdota kebendaan adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Oleh karena itu, yang menjadi obyek jual beli tidak hanya barang yang berwujud saja, tetapi juga benda tak berwujud. Pengertian benda secara yuridis berdasarkan ketentuan di atas adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

Perjanjian jual beli karena adanya hubungan hukum harus memperhatikan ketentuan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam 1320 KUHPerdota. Menurut R. Subekti 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu syarat subyektif dan Syarat obyektif. Syarat sbjektif adalah yang berkaitan dengan subyek dari

perjanjian, sedangkan syarat obyektif berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan<sup>9</sup>

Syarat obyektif menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah suatu hal tertentu. Dalam perjanjian jual beli harus menentukan jenis barang yang diperjanjikan supaya dapat ditentukan dan diperhitungkan sebagaimana diatur pasal 1333 KUHPerdara. Kaitannya dengan perjanjian jual beli, maka obyek perjanjian harus barang yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan pasal 1332 KUHPerdara. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, karena untuk dapat menentukan atau menetapkan kewajiban debitur apabila ada perselisihan.

Selain itu, syarat obyektif lainnya adalah isi perjanjian jual beli tersebut atau dikenal dengan suatu sebab yang halal. Perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu kepalsuan dan terlarang tidak memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 1335 KUHPerdara. Oleh karena itu dalam perjanjian jual beli tidak diperbolehkan memperdagang barang yang dilarang peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sahnya suatu perjanjian apabila syarat di atas terpenuhi. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberi kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Loc.cit*

pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai indikator kemajuan zaman. Hal ini berdampak terhadap perjanjian jual beli, dimana biasanya perjanjian jual beli diharuskan untuk bertatap muka diantara para pihak. Tetapi karena kemajuan zaman, perjanjian jual beli tidak lagi harus bertatap muka, cukup di tempat masing-masing sudah bisa melakukan transaksi.

Jadi jual beli *online* pada dasarnya memiliki unsur pokok yang sama dengan jual beli pada umumnya, namun yang membedakannya adalah transaksi jual beli bisa dilakukan dalam jarak jauh. Selain itu, sarana yang digunakan adalah komputer maupun teknologi lainnya yang terhubung jaringan internet. Tetapi dengan kemudahan tersebut, jual beli *online* tidak jarang disalahgunakan. Seringkali transaksi *online* menjadikan hal yang dilarang peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai obyek transaksi.

Jual beli *online* dengan kebebasan transaksi dengan dasar Asas Kebebasan Berkontrak (pasal 1338 KUHPerdara ayat 1) seperti dijelaskan juga oleh Sutan Remi Sjahdeini<sup>10</sup>, menurut penulis harus tetap memperhatikan hukum positif sebagai rambu-rambunya, serta tetap memegang teguh Asas Itikad Baik (pasal 1338 KUHPerdara ayat 3) dalam melakukan kegiatan *e-commerce*, seperti yang dicontohkan oleh Handri

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit*

Rahardjo<sup>11</sup>. Hal yang paling mendasar adalah syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal tersebut merupakan batasan bagi setiap orang dalam melakukan perjanjian, apabila menelisik obyek perjanjian jual beli *online* yang seringkali memperjualbelikan benda atau barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Memperjualbelikan barang atau benda yang dilarang melalui *online*, menurut penulis tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Sebab ke 4 (empat) syarat tersebut (kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal) bersifat kumulatif. Artinya ke 4 (empat) syarat tersebut harus dipenuhi apabila perjanjian dapat dikatakan sah. Berdasarkan uraian ini, penulis berpendapat bahwa jual beli *online* yang obyeknya barang atau benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan berdampak terhadap perjanjian (jual beli *online*) itu sendiri yaitu batal demi hukum. Memperjualbelikan barang atau benda terlarang tidak memenuhi unsure suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, dimana telah dibatasi sedemikian rupa yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum<sup>12</sup>, hal ini sesuai dengan pasal 1337 KUHPerdara. Selain itu dapat dilihat dalam pasal 1335 KUHPerdara yaitu apabila isi perjanjian itu merupakan hal yang dilarang maka tidak memiliki kekuatan mengikat.

---

<sup>11</sup> Handri Rahardjo, *Loc.cit*

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Loc.cit*

Penulis menegaskan kembali, apabila jual beli *online* dalam transaksinya menjadikan obyek perjanjian adalah barang atau benda yang dilarang peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Karena perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi persyaratan obyektif. Oleh karena demikian, perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata tidak melarang adanya perbuatan jual beli dengan cara online (*e-commerce*) walaupun tidak diatur secara tegas mengenai hal tersebut, yang menjadi permasalahan adalah mengenai obyek yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan nasional tetap dinyatakan bukan sebuah perjanjian yang diperbolehkan menurut KUHPdata sesuai ketentuan beberapa pasal yang telah diuraikan di atas.

## **2. Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas.

Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik, sesuai



ketentuan pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kemajuan teknologi menuntut hukum untuk responsive supaya sesuai dengan zaman. Hal ini terlihat dalam pasal 5 UU ITE yaitu memperluas alat bukti yang sah sebagaimana dalam hukum acara yang berlaku. Memperluas alat bukti yang dimaksud seperti mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetak dari dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari perjanjian secara mendasar sebagaimana dalam pasal 1313 KUHPerdara. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian dalam KUHPerdara bersifat terbuka yaitu ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka KUHPerdara ini dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Artinya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut penulis jual beli adalah hubungan hukum yang melibatkan minimal 2 (dua) pihak yang mengikatkan diri dengan kewajiban masing-masing yaitu penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga barang yang telah disepakati. Sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana satu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain

wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua<sup>13</sup>. Volmar dikutip Suryadiningrat mengatakan pada intinya bahwa, jual beli adalah pihak yang satu penjual (*vercopen*) mengikat diri pada pihak lain pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dengan memperoleh pembayaran pembeli, sejumlah yang telah disepakati dalam berwujud uang<sup>14</sup>.

Pada dasarnya dalam jual beli secara elektronik tersebut, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Pelaku usaha atau penjual merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen (Pasal 9 UU ITE). Selain itu penjual juga harus menawarkan produk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau pun mengandung cacat tersembunyi, dan merupakan barang yang layak untuk diperjualbelikan, sehingga transaksi jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. Seorang penjual memiliki hak untuk mendapatkan dari pembeli atas harga barang yang dijualnya juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini.

Sedangkan di pihak lain, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati anataran penjual dengan pembeli. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenarnya.

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit*

<sup>14</sup> R.M Suryo Diningrat, *Loc.cit*

Pembeli berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang dibelinya. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual yang beritikad tidak baik.

Kontrak elektronik dalam *e-commerce*, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat (1) UU ITE. Para pihak pada jual beli secara elektronik memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi elektronik yang sifatnya internasional, seperti yang diatur dalam pasal 18 UU ITE bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Selain itu para pihak juga memiliki kewenangan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif.

Transaksi elektronik menurut pasal 1 angka 2 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dengan demikian transaksi elektronik tidak bedanya dengan transaksi pada umumnya, hanya saja yang dijadikan sarana transaksi adalah komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Hal ini berbeda dengan transaksi pada umumnya yang mempertemukan secara langsung antara pihak-pihak atau melalui kuasanya.

Apabila merujuk pada konsep *e-commerce* yang dipaparkan oleh Adi Nugroho, penulis mencoba menguraikan dalam perspektif hukum kontrak

dan memberikan pandangan bahwa *e-commerce* adalah suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet.<sup>15</sup> Transaksi *e-commerce* dengan menggunakan media internet yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dengan pembeli, tentunya pembayarannya pun tidak dilakukan secara langsung. Pembayaran pada transaksi *e-commerce* bisa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *M-Banking*, *Internet Banking*, *charge card* atau *credit card*<sup>16</sup>.

Transaksi menggunakan sarana komputer atau melalui jaringan komputer lebih dikenal dengan menggunakan sarana internet, tidak jarang digunakan untuk transaksi yang dilarang peraturan perundang-undangan. Dewasa ini sering muncul berita mengenai prostitusi *online*, merebaknya isu artis sebagai penyedia jasa seksual seperti TB Rp. 200 juta, JD Rp. 150 juta, RF Rp. 60 juta, CS Rp. 60 juta, MT Rp. 55 juta, KA Rp. 55 juta, SB Rp. 55 juta, CW Rp. 50 juta, PUA Rp. 45 juta, NM Rp. 40 juta, CT Rp. 40 juta, UJ Rp. 35 juta, LM Rp. 35 juta, DL Rp. 30 juta, BS Rp. 30 juta, AA Rp. 25 juta, FNP Rp. 20 juta sebagaimana yang telah diberitakan oleh media *online*<sup>17</sup>. Media sosial menjadi tempat pemasaran alternatif untuk menggaet konsumen, dan seringkali digunakan untuk menggaet konsumen berkelas. Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat

---

<sup>15</sup> Adi Nugroho, *Loc.cit*

<sup>16</sup> Edmon Makarim, *Loc.cit*

<sup>17</sup> Admin, *Nama dan Tarif Artis yang Diduga Terkait Prostitusi Online*, <http://terbaru8.com>, Diakses tanggal 8 November 2016

dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Perbuatan promosi prostitusi *online* dapat dijerat melalui UU ITE pasal 27 ayat (1) menegaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud “muatan yang melanggar kesusilaan”. Menurut penulis mempromosikan prostitusi *online* merupakan termasuk “muatan yang melanggar kesusilaan”, karena pada umumnya prostitusi secara moralitas tidak dapat dibenarkan atas dasar alasan apa pun.

Apabila demikian, setiap orang yang melakukan promosi prostitusi tersebut telah melakukan tindak pidana, karena unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan konkret dan memenuhi rumusan delik (dalam hal ini Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Adapun ketentuan pidananya diatur pasal 45 ayat (1) UU ITE setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Mengingat dalam penggunaan suatu sistem elektronik dan teknologi informasi kerap menimbulkan suatu permasalahan, maka UU ITE telah mengatur secara tegas setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang (*cyber crime*) yang dapat menimbulkan kewajiban

pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE.

Oleh karena demikian, jual beli *online* harus memperhatikan ketentuan yang telah ada. Batasan tersebut bertujuan untuk mencegah maraknya obyek transaksi yang dilarang bertambah. Sarana elektronik memang memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi kemudahan demikian tetap dikoridornya. Artinya perbuatan setiap orang yang menggunakan komputer dan jaringan komputer harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat, seperti lahirnya UU ITE sebagai bentuk respon terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila kembali melihat ketentuan perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Dalam hal ini, sahnya perjanjian apabila telah ada kesepakatan dan pihak dalam perjanjian itu telah cakap melakukan kewenangan hukumnya sebagai subyek hukum.

### **3. Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Berkembangnya bisnis *e-commerce* di Indonesia diperlukan peraturan dan regulasi untuk memunculkan aturan main yang jelas dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha bisnis *e-commerce* di Indonesia. Atas perkembangan tersebut Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur bisnis *e-commerce* yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Tentang Perdagangan. Undang-undang ini dijadikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik sebagaimana diatur pasal 1 angka 24 UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dengan menggunakan sistem elektronik harus menyediakan informasi dengan lengkap dan benar. Selain itu, pelaku usaha dalam memperdagangkan barang melalui sistem elektronik tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seperti diatur pasal 65 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan bahwa. Dalam transaksi elektronik para pihak yang bersangkutan diharuskan beritikad baik dalam melakukan interaksi atau pertukaran informasi elektronik selama transaksi berlangsung, sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (2) UU ITE.

Pelaku usaha dalam memperdagangkan barang melalui sistem elektronik supaya barang yang diperjualbelikan tidak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE. Oleh karena demikian pelaku usaha melalui sistem elektronik diwajibkan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dalam hal ini UU perdagangan dan UU ITE.

Adapun informasi yang harus disediakan pelaku usaha melalui sistem elektronik minimal harus memuat identitas dan legalitas pelaku usaha,

persyaratan teknis barang yang ditawarkan, harga barang yang ditawarkan, cara pembayaran, dan cara penyerahan barang. Apabila dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik terjadi perselisihan antar pihak bersangkutan, pelaku usaha (penjual) dan pembeli mempunyai kebebasan untuk memilih metode penyelesaian perselisihan tersebut. Metode penyelesaian yang dimaksud diatur pasal 65 ayat (5) UU No.7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis undang-undang perdagangan mengadopsi asas kebebasan berkontrak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Selain mempunyai kebebasan dalam menentukan isi perjanjian antara pelaku usaha dan pembeli melalui sistem elektronik, dapat juga menentukan metode penyelesaian sengketa apabila muncul dikemudian hari. Kebebasan berkontrak dalam menentukan isi perjanjian antar penjual dan pembeli melalui sistem elektronik bukan berarti mempunyai kebebasan yang tidak memiliki batasan. Kebebasan isi perjanjian melalui sistem elektronik juga dibatasi oleh suatu sebab yang halal sebagaimana salah satu persyaratan sah nya perjanjian. Sehingga pelaku usaha yang memperdagangkan barang melalui sistem elektronik tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang yang dilarang undang-undang.

Menurut penulis apabila pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang dilarang oleh undang-undang melalui sistem elektronik merupakan salah satu jenis tindak pidana sesuai pasal 36 UU No.7 Tahun 2014 tentang



perdagangan. Adapun barang dan jasa yang dilarang untuk diperdagangkan diatur pasal 35 ayat (1) UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan yaitu pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan, melindungi kedaulatan ekonomi, keamanan Negara, moral dan budaya masyarakat, kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi, neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan, melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110 UU Perdagangan menyebutkan: Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Menurut pasal 110 UU Perdagangan tersebut memperdagangkan barang yang dilarang melalui sistem elektronik menurut merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan perbuatan yang dapat dipidana.

Oleh karena demikian, hubungan hukum antara subyek hukum dalam hal ini jual beli, dimana hubungan hukum ini pada dasarnya ranah privat. Sebab perjanjian jual beli menitikberatkan terhadap subyek hukum itu sendiri (penjual dan pembeli) dan hanya mengikat bagi subyek hukum dengan dasar asas *pacta sun servanda*.

Penulis berpendapat ada pergeseran dari hukum privat keranah hukum publik. Didasarkan atas hubungan hukum jual beli melalui sistem elektronik namun memperdagangkan barang atau jasa yang dilarang undang-undang. Melakukan hal yang dilarang tersebut yang mengandung unsur pidana inilah menjadi ranah hukum publik yaitu hukum pidana.

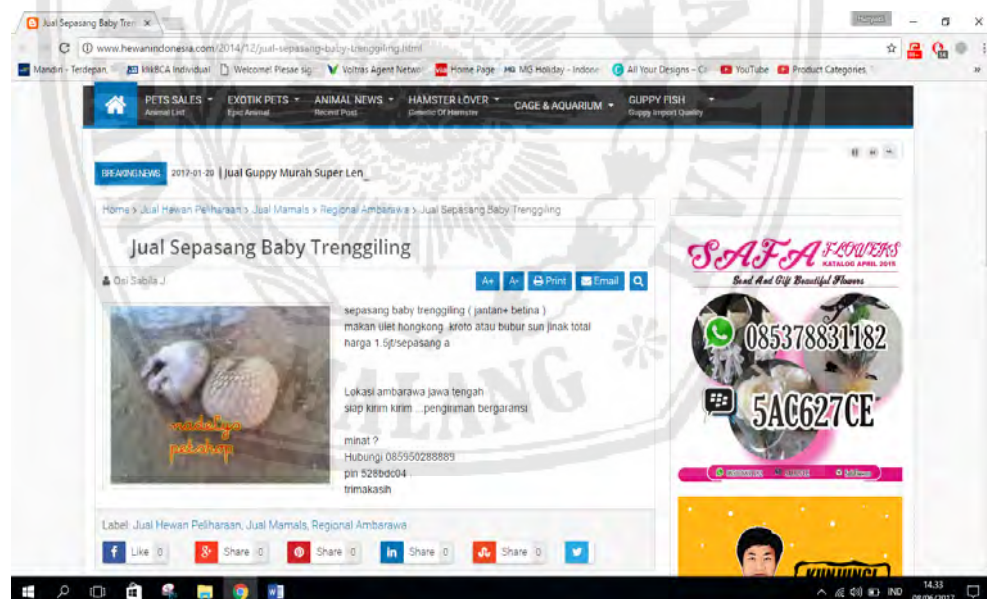
#### **4. Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**

Perkembangan dunia bisnis semakin pesat sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Selain mendapatkan sarana penjualan yang luas melalui media elektronik atau berjualan dengan sistem elektronik (*e-commerce*), pelaku bisnis *online* juga memiliki kebebasan dalam bertransaksi. Namun kebebasan tersebut sering disalahgunakan seperti memperjualbelikan satwa yang dilindungi.

Pelaku bisnis satwa terus berkembang seiring dengan bertambahnya peminat satwa-satwa yang diperjualbelikan. Terlebih satwa langka, mendapat peminat terus meningkat untuk dikoleksi. Perbuatan menangkap, memiliki dan memperjualbelikan satwa adalah perbuatan dilarang. Larangan tersebut diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Berikut ini contoh fakta dari maraknya jual beli satwa langka secara *online*.



Selain itu berikut ini merupakan contoh penawaran yang dilakukan oleh penjual dalam *e-commerce* saat menawarkan obyek jual belinya.



Menurut Conference of the Parties (CoP) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dalam pertemuannya yang ke-17 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 24

September – 5 Oktober 2016, hewan Trenggiling merupakan spesies yang dilindungi.<sup>18</sup>

Memperjualbelikan obyek tersebut tentu bertentangan dengan pasal 35 ayat (1) huruf d UU Perdagangan yaitu “larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup” dan dapat dikenakan hukuman pidana sesuai pasal 110 dengan “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika dilihat dari keterangan obyek jual beli satwa tersebut, penjual hanya menerangkan usia, jenis kelamin, dan harga dari obyek jual beli, sedangkan profil dari penjual sendiri hanya terdapat nama, nomor telepon, dan PIN BBM. Hal tersebut tentu melanggar ketentuan pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan yaitu mengenai kelengkapan data dan/atau informasi pelaku usaha. Jika ketentuan ini maka sesuai pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan, maka pelaku usaha akan dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Izin yang dimaksud adalah izin dari Menteri Perdagangan untuk melakukan perdagangan yaitu berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun contoh yang dijelaskan penulis adalah jual beli skala kecil, dimana pihak penjual bukan merupakan badan usaha, sehingga hal tersebut menyulitkan pihak pemerintah dalam melakukan pengawasan. Faktanya jika situs jual beli dalam skala kecil tetap dibiarkan bebas menawarkan obyek

---

<sup>18</sup> Admin, *COP Cites ke-17: Trenggiling Hewan Dilindungi*, <http://nasional.ilinal.com>, diakses tanggal 2 Februari 2017

jual beli yang melanggar ketentuan undang-undang, maka jumlahnya akan semakin meningkat. Hal tersebut tentu akan dapat merugikan negara dalam menjaga kelestarian hidup hewan.

Tujuan diaturnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia, sebagaimana diatur pasal 3 UU No.5 Tahun 1990. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa konservasi sumber daya alam hayati merupakan tanggungjawab serta kewajiban masyarakat. Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Namun harapan pemerintah dalam konservasi sumber daya alam hayati tidak diindahkan oleh masyarakat tertentu, justru memperjualbelikan satwa yang dilindungi sebagai obyek konservasi sumber daya alam hayati. Padahal jelas dalam pasal 21 UU No.5 Tahun 1990 bahwa perbuatan menangkap, memiliki, mengangkut, memelihara, membunuh, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi merupakan perbuatan dilarang. Karena perbuatan tersebut tidak termasuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun satwa dan tumbuhan yang dapat ditangkap, dipelihara, dan diperjualbelikan adalah tumbuhan dan satwa liar. Pasal 38 UU No.5 Tahun

1990 mengatur hal tersebut sebagai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pasal 40 UU No.5 Tahun 1990 mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran atas larangan yang telah diuraikan diatas seperti menangkap, memiliki, mengangkut, memelihara, membunuh, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Oleh karena itu, penulis menegaskan kembali bahwa memperjualbelikan tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagai obyek konsevasi sumber daya alam hayati baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik (*online*) adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana meskipun hubungan hukum berupa perjanjian jual beli merupakan hukum privat. Hal tersebut dikarenakan obyek perjanjian jual belinya adalah obyek yang dilarang hukum positif Indonesia. Selain itu apabila mengacu dalam syarat sahnya perjanjian diatur pasal 1320 KUHPerdata, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur obyektif sehingga perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum.

##### **5. Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Perubahan secara besar-besaran di ranah jual beli sudah melebur dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudahan transaksi jual beli itulah yang dimanfaatkan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi jarak jauh dengan memanfaatkan peluang yang ada,

semua hal baik barang maupun jasa, legal maupun ilegal, bisa diperjualbelikan baik *online* maupun *offline*. Jual beli ilegal, pembeli maupun penjual memilih jalur *online* karena sangat aman dilakukan secara *online* daripada transaksi konvensional yang mengharuskan kedua belah pihak melakukan pertemuan fisik.

Penjualan narkoba secara *online* mampu memberikan efek pemasaran yang berlipat-lipat jika dibandingkan dengan penjualan secara konvensional. Berikut ini contoh tertangkapnya pelaku usaha *e-commerce* yang menjual brownis ganja online, ini merupakan modus baru dalam peredaran penjualan Ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan 1



Untuk mendapatkan brownis ini, konsumen bisa memesan melalui telepon atau layanan Blackberry Messenger (BBM). Selain membuat brownis isi ganja, IR juga memproduksi kue kering dan coklat, serta memiliki toko yang menjual aksesoris seperti pipa rokok, boong, kertas papir (kertas linting ganja), sepatu dari serat ganja, hingga kaos bergambar daun



ganja, di lantai 1 Blok M Plaza. Tiap loyang brownis dijual melalui toko *online* di [www.tokohemp.com](http://www.tokohemp.com) dengan harga Rp 200.000 perbuah.<sup>19</sup> Saat penulis membuka [www.tokohemp.com](http://www.tokohemp.com), ternyata situs tersebut telah diblokir oleh *Trust+Positif* melalui kewenangan Kementerian Kominfo. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan munculnya situs lain beserta pelaku usaha lain dalam menawarkan obyek jual beli yang dilarang oleh undang-undang.

Brownies ganja ternyata bukan barang baru di Indonesia. Keberadaan brownies ini sudah dinikmati bertahun-tahun oleh para pelanggannya. Hal ini diakui oleh mantan pelanggan yang biasa disapa An (20). Ia dan temannya sudah menikmati brownies tersebut mulai 2013 lalu. "Kalau ini emang udah lama banget. Cuma enggak tahu baru kebuka sekarang," kata An saat ditemui Kompas.com, Jakarta, Kamis (16/4/2015). An bercerita, awal peredaran bisnis ini dilakukan secara konvensional. Salah satunya lewat omongan dari satu ke yang lainnya. "Awalnya dari mulut ke mulut. Terus bisa nyebar ke mana-mana," ungkap An. Meski banyak pesanan, penjual brownies ganja sangat berhati-hati. Dia tidak akan sembarangan percaya dengan orang yang memesan brownies-nya. "Soalnya dia jual pilih-pilih orang. Enggak semuanya asal jual," ungkap An.<sup>20</sup>

Penggunaan media sosial pesan instant (*instant messaging*) seperti Blackberry Messenger (BBM), Whatsapp, Line yaitu sistem pengiriman

<sup>19</sup> Priska Sari Pratiwi, *BNN Temukan Bisnis Online Brownis Isi Ganja*, <http://www.beritasatu.com>, Diakses tanggal 2 Februari 2017

<sup>20</sup> Kahfi Dirga Cahya, *Pengakuan Mantan Pelanggan Brownies Ganja*, <http://megapolitan.kompas.com>, Diakses tanggal 2 Februari 2017



pesan dengan cepat melalui perantaraan jaringan internet dengan menggunakan *Smartphone*. Media sosial tersebut selain dapat mengirimkan pesan singkat juga dapat mengirimkan pesan gambar. Hal inilah yang memudahkan para pelaku usaha dan pembeli untuk melakukan transaksi.

Memperjualbelikan narkoba tidak dapat dibenarkan berdasarkan UU No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap orang yang memperjualbelikan narkoba dapat dikenakan pidana karena telah memenuhi unsur pasal 115 (1) UU Narkotika. Menurut penulis, memperdagangkan narkoba melalui sistem elektronik tetap merupakan tindak pidana meskipun UU narkoba tidak mengatur secara tegas mengenai jual beli narkoba secara *online*.

Penulis menegaskan kembali, bahwa jual beli narkoba secara *online* adalah perbuatan dipidana. Dalam hal ini meskipun undang-undang mengenai *e-commerce* masih tidak menjamin kepastian hukum, akan tetapi terkait masalah yang dijelaskan oleh penulis yaitu penjualan brownis ganja secara *online*. Ganja merupakan Narkoba Golongan 1, dalam pasal 115 ayat (2) UU Narkotika dijelaskan bahwa “perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Apabila mengacu dalam syarat sahnya perjanjian diatur pasal

1320 KUHPperdata, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur obyektif sehingga perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum.

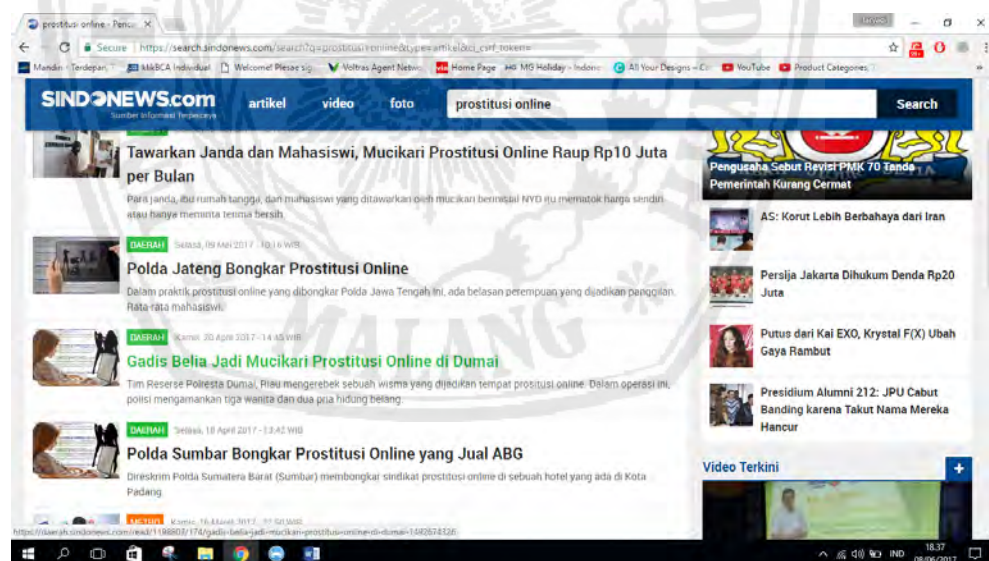
**6. Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan peraturan tentang perdagangan orang, pada tanggal 19 April 2007, Lembaran Negara nomor 58, Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-Undang ini adalah salah satu produk kebijakan publik harus memastikan isinya telah mengakomodasi kepentingan masyarakat. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang cukup komprehensif, karena tidak hanya mempidanakan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban secara menyeluruh, dan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan serta penanganan kasus, dan undang-undang ini juga merupakan pencerminan standar internasional.

Tindak perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat atau sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan

eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi. Hal ini sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UU PTPPO.

Dewasa ini, dengan adanya sistem elektronik dan media sosial telah memudahkan dalam melakukan transaksi. Tingkat kejahatan perdagangan orang terutama melalui media online semakin marak. Media internet merupakan sarana yang efektif digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan manusia. Perbuatan perekrutan atau pengendalian korban perdagangan manusia melalui media sosial (internet) sangat membantu pelaku dalam menjalankan perbuatan tersebut. Salah satu bentuk perdagangan orang dari kemajuan teknologi adalah maraknya prostitusi *online*. Berikut contoh maraknya prostitusi *online*.



American Center for International Labor Solidarity (ACILS) dan International Catholic Migration Commission (ICMC) telah membuat

kerangka kerja untuk mempermudah menjelaskan proses perdagangan manusia sebagai berikut:<sup>21</sup>

<b>Proses</b>	+	<b>Jalan/Cara</b>	+	<b>Tujuan</b>
Perekrutan atau Pengiriman atau Pemindahan atau Penampungan atau Penerimaan	D A N	Ancaman atau Pemaksaan atau Penculikan atau Penipuan atau Kebohongan atau Penyalahgunaan Kekuasaan	D A N	Prostitusi atau Pornografi atau Kekerasan/eksploitasi seksual atau Kerja paksa atau Perbudakan/praktik- praktik serupa

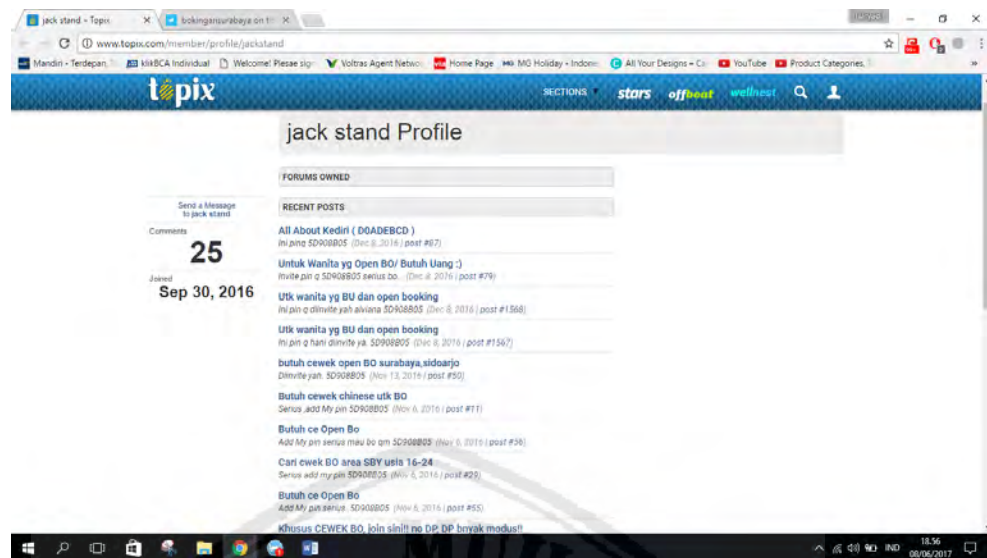
Apabila kita implementasikan kejadian tersebut di atas, maka unsur perbuatan (proses) di mana terjadi perekrutan atau penerimaan “PSK” oleh mucikari, unsur kedua yaitu sarana (cara) yang diduga dilakukan oleh mucikari untuk mengendalikan korban adalah dengan penipuan atau kecurangan/kebohongan atau pemaksaan. Sementara itu, unsur yang ketiga adalah tujuan untuk prostitusi atau eksploitasi seksual. Merujuk pada ketentuan di dalam UU PTPPO dan skema di atas, maka ketiga unsur telah terpenuhi sehingga kasus prostitusi online diatas dapat dikategorikan tindak pidana perdagangan orang.

<sup>21</sup> Erna Ratnaningsih, *Jerat Hukum Pelaku Dan Korban Prostitusi Online*, <http://business-law.binus.ac.id>, Diakses tanggal 2 Februari 2017

Menurut pasal 1 angka 7 UU PTPPO, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. Ada pun ketentuan pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang diatur pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yaitu dapat dikenakan pidana penjara 15 (paling lama lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa merupakan kualifikasi kejahatan, karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman berat. Namun, ketentuan pasal 297 KUHP tersebut, pada saat ini tidak dapat diterapkan secara lintas Negara sebagai kejahatan internasional atau transnasional.

Prostitusi *online* saat ini telah dianggap sebagai hal yang biasa dikalangan masyarakat. Banyak media yang telah mempermudah dalam melakukan prostitusi *online*. Berikut contoh situs yang menyediakan jasa pekerja seks komersial (PSK).



Dari situs tersebut dapat dilihat bahwa pelaku hanya mencantumkan nomor pribadi yang bisa dihubungi untuk berkomunikasi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan mereka sedang mencari dan menawarkan PSK melalui situs tersebut, selain itu meski penawaran tersebut bersifat publik namun pada proses transaksinya dilakukan melalui media pesan privat yang berupa Blackberry Messenger (BBM). Hal tersebut tentu telah melanggar ketentuan pasal 27 UU ITE yaitu melanggar kesusilaan.

Dalam kasus prostitusi *online* tidak jarang beberapa PSK saat ditangkap oleh kepolisian mengaku sebagai korban. Pasal 1 butir 3 UU PTPPO menjelaskan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. PSK yang dengan sengaja direkrut dengan proses sebagaimana ketiga unsur di atas maka dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang. Apabila seseorang yang menjadikan PSK sebagai pekerjaan dan tidak mengalami penderitaan psikis,

mental, fisik, dan/atau ekonomi akibat dari tindak pidana perdagangan orang maka tidak dapat dikatakan sebagai korban.

Kepolisian memang tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK sendiri mengingat di dalam ketentuan pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjerat penyedia PSK/Mucikari. PSK/Mucikari dapat dikenakan UU PTPPO dibandingkan dengan pasal dalam KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), dalam hal ini UU PTPPO mengesampingkan KUHP.

Selain itu, meski di KUHP tidak menghukum PSK maupun pelanggannya, namun pengaturan hukuman biasanya ada dalam peraturan daerah. Contoh peraturan yang mengatur tentang PSK : Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda DKI 8/2007). Selain itu tentang PSK juga diatur dalam peraturan pelaksana Perda DKI 8/2007 yaitu PerGub Provinsi DKI Jakarta No. 221 Tahun 2009. Dalam Perda DKI 8/2007 diatur bahwa setiap orang dilarang menjadi penjaja seks komersial maupun memakai jasa penjaja seks komersial. Hukuman bagi PSK dan pelanggannya adalah pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 30 juta.

Contoh peraturan lain yang mengatur tentang PSK adalah Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Perda tersebut

melarang siapapun di dalam wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran, dimana pengertian pelacuran adalah hubungan seks di luar pernikahan, di hotel, restoran, dan tempat hiburan atau lokasi pelacuran dengan mendapat imbalan jasa. Orang yang melakukan pelacuran di Kota Tangerang diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 15 juta.

Dalam penanganan kasus prostitusi *online*, kepolisian diharapkan lebih aktif di dalam mengurangi keterlibatan jaringan dari kasus perdagangan orang, tidak hanya berhenti pada mucikari namun juga orang-orang yang melakukan rekrutmen dan mengambil keuntungan dari perdagangan orang. Selain itu untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban *trafficking*, kepolisian dapat bekerja sama dengan psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan dan anggota keluarga selama proses penyidikan. Korban harus dikuatkan dan diselamatkan sehingga mereka mendapatkan keadilan dan tidak terjerumus kembali sebagai PSK.

Oleh karena demikian, jual beli *online* dimana obyek hukumnya dilarang berdasarkan perundang-undangan (UU PTPPO) seperti perdagangan orang merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Artinya meskipun jual beli pada umumnya merupakan hubungan antar subyek hukum yang satu dengan lainnya dalam ranah hukum perdata (*privat*), tetapi apabila obyek hukum dalam hubungan hukum (jual beli) itu adalah manusia (orang) maka hal tersebut telah bergeser ke arah pidana yaitu memperdagangkan manusia.



Dari berbagai penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) yang obyek jual belinya melanggar ketentuan undang-undang pada pokoknya tidak memenuhi pasal 1320 KUHPdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian pada syarat “suatu sebab yang halal” dan akibat hukum apabila tidak memenuhi syarat ini adalah perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dan batal demi hukum.

Dewasa ini, jenis jenis obyek jual beli yang terjadi di masyarakat semakin bermacam-macam dengan obyeknya yang melanggar ketentuan undang-undang, sehingga tidak cukup jika perjanjian tersebut hanya batal demi hukum, karena beberapa obyek jual beli yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut memiliki akibat hukum yang mengharuskan para pelaku dituntut dengan hukuman pidana. Penulis berpendapat ada pergeseran dari hukum privat ke ranah hukum publik. Didasarkan atas hubungan hukum jual beli melalui sistem elektronik namun memperdagangkan barang atau jasa yang dilarang undang-undang. Melakukan hal yang dilarang tersebut yang mengandung unsur pidana inilah menjadi ranah hukum publik yaitu hukum pidana.

### **C. Peran Pemerintah Dalam Mencegah Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-Undang**

Praktik jual beli melalui internet (*e-commerce*) dengan obyek yang dilarang oleh undang-undang terus berlangsung walaupun telah banyak adanya larangan-larangan. Dan dengan akibat hukumnya adalah batal demi hukum sebagaimana telah diuraikan penulis di atas. Dinamika *e-commerce* yang terus berkembang

dengan menuntut negara untuk mengambil tindakan efektif (*effective actions*) dalam hal mencegah dan memerangi jual beli yang tidak sah tersebut.

Dewasa ini kegiatan bisnis melalui sistem elektronik dengan memperjualbelikan barang yang dilarang undang-undang marak terjadi. Misalnya perdagangan satwa langka secara *online* meskipun telah diatur UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, perdagangan brownis ganja (narkotika) secara *online* meskipun telah diatur UU No.39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perdagangan manusia juga marak terjadi melalui transaksi elektronik meskipun telah diatur UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketentuan jual beli dalam KUHPdata terdapat dalam pasal 1457, hanya mengatur kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak berkewajiban menyerahkan barang dan pihak lain berkewajiban menyerahkan pembayaran yang telah disepakati. Melihat ketentuan ini (pasal 1457 KUHPdata) apabila dikaitkan dengan kegiatan bisnis melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) para pihak memang tidak ada keharusan untuk bertatap muka secara langsung sehingga sulit mengetahui apakah para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdata.

Selain itu, UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut penulis tidak mampu melakukan upaya pencegahan. Ketiga tindak pidana ini (tindak pidana perdagangan satwa sangka, narkotika dan perdagangan orang)

marak terjadi melalui transaksi elektronik namun ketiga UU yang mengatur (UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, UU Narkotika dan UU Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) tidak mengadopsi upaya pencegahan melalui transaksi elektronik. Sebab ketiga UU tersebut “hidup” atau “bergerak” apabila perbuatan seseorang telah memenuhi rumusan sebagai tindak pidana sebagaimana dalam UU terkait. Artinya perbuatan perdagangan satwa langka, memperjualbelikan narkotika, dan perdagangan orang secara *online* telah dilakukan oleh seseorang, baru kemudian UU terkait dapat digunakan.

Pemerintah sebagai penegak hukum memiliki peran krusial terhadap efektifitas hukum, hukum tanpa keberadaan penegak hukum akan menjadi lumpuh. Hukum tidak akan bisa berjalan untuk menjerat perbuatan yang tidak dapat dibenarkan tanpa penegak hukum. Peran penegak hukum begitu penting, dengan penegak hukum yang baik meskipun dengan peraturan perundang-undangan yang buruk dapat mewujudkan keadilan. Untuk itu, penegak hukum diharapkan mampu mengawal dan menjalankan hukum itu guna terwujudnya tujuan hukum itu sendiri.

Dewasa ini, jual beli *online* dengan memperdagangkan barang dilarang sedang marak terjadi. Hal tersebut membuktikan kelemahan penegak hukum dalam melakukan pengawasan sejak dini secara *online*. Pemerintah belum mampu melakukan upaya pencegahan transaksi *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Lemahnya pengawasan penegak hukum sejak dini mengenai penggunaan media elektronik untuk mendeteksi dan mencegah transaksi yang dilarang. Karena demikian transaksi melalui *online* tersebut seakan tidak terpantau

penegak hukum, bahkan bagi pelaku bisnis *online* dengan obyek terlarang merasakan bahwa bisnis dalam dunia maya seakan dunia bebas tanpa terikat apapun kecuali transaksi yang dibuat para pihak.

Kondisi demikian mendapatkan reaksi pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Maraknya penggunaan media sosial dalam melakukan perbuatan yang dilarang, Kementerian Kominfo membentuk sistem internet positif. Bentuk kerja internet positif ini, bahwa apabila pengguna internet mengakses website ilegal. Kehadiran internet positif sebagai upaya pencegahan oleh pemerintah terhadap penyalahgunaan media elektronik yang tersambung dengan jaringan internet. Internet positif akan memblokir website yang menyediakan dokumen bermuatan susila seperti pornografi sebagaimana diatur pasal 27 UU ITE. Kehadiran internet positif merupakan bentuk pelaksanaan pasal 27 UU ITE sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan media elektronik oleh pemerintah melalui Kementerian Kominfo.

Namun upaya pemerintah tersebut belum maksimal, sebab masih marak terjadi penyalahgunaan media elektronik yang tersambung dengan internet. Sistem internet positif tersebut mampu diterobos hanya dengan menggunakan add-ons seperti proxy era, anonymox, dan lain-lain. Add-ons ini bekerja dengan merubah alamat IP asal Indonesia diganti dengan alamat IP negara lain. Alamat IP (Internet Protocol Address atau sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet, panjang dari angka ini adalah 32 bit ( untuk Ipv4 atau IP versi 4), dan 128 bit (untuk Ipv6 atau IP versi 6) yang

menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP/IP<sup>22</sup>. Sehingga meskipun pemerintah Indonesia telah memblokir situs yang bermuatan negatif melalui Kementerian Kominfo namun negara lain belum tentu memblokir situs tersebut sehingga situs dengan mudah dapat dibuka jika menggunakan IP asal negara lain tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya lain untuk menertibkan pengguna media elektronik yang tersambung dengan jaringan internet.

Selain itu Internet Positif diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dalam aturan itu dijelaskan tata cara pemblokiran situs negatif, yang tertuang dalam Bab VI. Sebelum pemblokiran ditetapkan, masyarakat terlebih dahulu menyampaikan adanya situs internet bermuatan negatif kepada Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa *e-mail* aduan atau pelaporan berbagai situs yang disediakan. Jenis situs negatif itu adalah yang mengandung unsur pornografi dan kegiatan ilegal. Setelah itu, laporan-laporan akan dikelola yang prosesnya meliputi penyimpanan laporan asli ke dalam berkas dan database elektronik, peninjauan dan pengambilan sampel ke situs internet yang dituju, dan penyimpanan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database elektronik. Tata cara tindak lanjut laporan terbagi tiga yaitu dari masyarakat, kementerian atau lembaga, dan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, *Alamat IP*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses tanggal 6 Januari 2017

<sup>23</sup> Andina Librianty, *Begini Cara Kominfo Memblokir Situs Negatif*, <http://tekno.liputan6.com>, Diakses tanggal 10 November 2016

Dari penjelasan di atas peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menangani konten yang bermuatan negatif di internet. Sehingga masyarakat berperan secara aktif demi efektifnya peran Kementerian Kominfo dalam mengatasi jual beli melalui internet yang obyeknya dilarang oleh perundang-undangan. Masyarakat pada umumnya menggunakan media elektronik untuk mengoperasikan media sosial. Keberadaan media sosial merupakan bukti nyata atas kemajuan teknologi informasi. Media komunikasi (media sosial) memiliki banyak jenisnya. Media sosial sebagai sarana komunikasi telah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali anak-anak. Keberadaan media sosial ini berdampak positif dan sangat mudah dioperasikan oleh setiap orang. Dampak positif dimaksud adalah mempermudah untuk mendapat informasi, efektif dan efisiensi dalam berkomunikasi maupun melakukan bisnis.

Bagi masyarakat yang memiliki usaha jual beli, melakukan jual beli melalui internet (*e-commerce*) tentu memiliki keuntungan lebih, misalnya memperluas pemasaran, menemukan lebih banyak pelanggan, menemukan supplier dan partner bisnis yang paling cocok, menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan menghemat waktu<sup>24</sup>. Bagi pihak pembeli, melakukan *e-commerce* juga memiliki keuntungan seperti memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam, memberikan lebih banyak pilihan kepada pembeli untuk memilih berbagai produk<sup>25</sup>, keuntungannya jual beli secara online bagi pembeli juga didapat dalam tiap tahapan transaksi mulai dari penawaran yang tidak terikat ruang dan waktu, tahap

---

<sup>24</sup> M. Suyanto, *Loc.cit*

<sup>25</sup> *Ibid*

penerimaan yang tidak mengharuskan pembeli beranjak dari tempatnya dan terakhir tahap pembayaran yang dapat dilakukan dengan berbagai cara pada saat ini, mulai dengan cara *sms banking* dan *mobile banking* yang hanya membutuhkan koneksi internet saja tanpa harus melakukan perjalanan.<sup>26</sup>

Pengetahuan hukum masyarakat yang kurang juga menimbulkan terjadinya transaksi jual beli online dengan obyek yang dilarang, pada hakikatnya pengetahuan sangat diperlukan terlebih lagi pada obyek satwa yang dilindungi, satwa yang dilindungi masih sering terjadi di mana-mana, baik melalui online ataupun secara langsung, tetapi jual beli tersebut tahap penerimaannya dilakukan dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Tetapi banyak pula yang sudah mengetahui bahwasannya obyek suatu perjanjian merupakan obyek yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, seperti jual-beli narkoba dan perdagangan orang yang jelas dilarang. Namun dalam hal ini masyarakat tetap tidak mengindahkan hal tersebut, ditambah lagi dengan berbagai kemudahan-kemudahan dengan disertai keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya *e-commerce* bukanlah tanpa aturan sehingga terdapat kebebasan seluas mungkin seperti memperjualbelikan obyek yang dilarang peraturan perundang-undangan. Setiap orang dalam menjalankan *e-commerce* harus tunduk terhadap UU No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan UU ITE ini merupakan upaya pemerintah dalam menertibkan pelaku *e-commerce* agar melakukan kegiatan jual beli yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya dalam penanggulangan dan

---

<sup>26</sup> Edmon Makarim, *Loc.cit*

pencegahan terhadap pelaku *e-commerce* yang melanggar perundang-undangan pemerintah juga merumuskan peraturan pelaksana UU ITE yaitu PP No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain itu upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *e-commerce* dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, tugas Kementerian Koinfo yaitu “Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kementerian Koinfo menyelenggarakan fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam pengelolaan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Peraturan presiden tentang Kementerian Koinfo tersebut juga mengatur adanya susunan organisasi dalam Kementerian Koinfo sendiri. Oleh karena itu, penanggulangan dan pencegahan pelaku *e-commerce* dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

Susunan organisasi dalam Kementerian Koinfo terdapat adanya direktorat jendral aplikasi informatika dan direktorat jendral informasi dan komunikasi publik. Tugas direktorat jendral aplikasi informatika diatur dalam pasal 15 Perpres No. 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koinfo yaitu “Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika”.



Berdasarkan perpres tersebut Kementerian Kominfo melalui direktorat jendral aplikasi informatika dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam penatakelolaan *e-business*. Oleh karena itu Kementerian Kominfo memiliki tanggungjawab dalam menertibkan *e-commerce* terhadap pelaku yang melanggar perundang-undangan terkait.

Upaya pencegahan Kementerian Kominfo dapat merumuskan peraturan menteri sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan terkait, serta menindak pelaku *e-commerce* yang telah melanggar ketentuan yang telah berlaku. Selain itu Kementerian Kominfo dapat melakukan pemblokiran terhadap aplikasi yang melanggar kesusilaan dan peraturan perundangan. Upaya pencegahan Kementerian Kominfo yang telah dilakukan terhadap aplikasi informatika dalam *e-commerce* yang melanggar kesusilaan dan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu melalui program Internet Positif. Program tersebut bergerak dengan memblokir situs apabila terdapat seseorang membuka situs-situs tertentu yang tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Positif sehingga situs tersebut tidak dapat dibuka. Upaya pencegahan Kementerian Kominfo melalui program internet positif tersebut dapat mengurangi perbuatan yang tidak dapat dibenarkan perundang-undangan.

Selain itu upaya pemerintah dalam menertibkan *e-commerce* dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012. Terbitnya regulasi yang mengatur industri *e-commerce* sebagai bentuk dukungan dan perlindungan bagi pelaku *e-commerce* seiring dengan perkembangannya. Pengaturan *e-commerce* dalam Peraturan Pemerintah tersebut salah satunya mengenai data center

perusahaan *e-commerce* yang harus berlokasi di Indonesia dan mendorong setiap perusahaan menggunakan domain “.id” untuk memudahkan dalam penelusuran apabila terdapat *cyber* atau perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penerbitan UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan *e-commerce* di Indonesia. UU Perdagangan mengatur bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha *e-commerce* juga diharuskan mendapatkan izin usaha sesuai dengan barang atau jasa yang diperdagangkan. Artinya pelaku usaha *e-commerce* harus mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Transaksi jual beli melalui internet dengan obyek yang dilarang oleh Undang-undang sampai saat ini terus terjadi, walaupun beberapa peraturan telah diterapkan, namun dengan tingkat kepatuhan yang minim terhadap substansi peraturan perundang-undangan menjadi salah satu aspek selalu terjadinya hal tersebut. Peran pemerintah dalam hal ini yang menjadi *domain* dari Kementerian komunikasi dan informasi Republik Indonesia sangat dibutuhkan untuk melakukan pencegahannya, karena para pihak dalam sebenarnya sama-sama memanfaatkan celah hukum untuk melakukan transaksi jual beli yang obyeknya dilarang ini.

Dari berbagai pemaparan penulis di atas, berikut ini merupakan peran pemerintah yang sebaiknya dilakukan dalam mengatasi masalah dalam *e-commerce* agar dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar hukum, yaitu:

1. Kerja sama terhadap Penyelenggara Jasa Internet (PJI) atau *Internet Service Provider* (ISP)

*Provider* merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini termasuk pula operator-operator seluler sebagai pihak yang memberikan sarana komunikasi dengan telepon genggam (yang dewasa ini marak digunakan).

Dalam dunia yang serba cepat dan informasi yang cepat menyebar pula membutuhkan kesadaran dari berbagai pihak. Dalam jual beli dengan obyek yang telah dilarang oleh Undang-undang seharusnya dapat di tanggulangi sejak dini atau sejak awal kemunculan situs jual beli dengan obyek yang dilarang. Pengawasan terhadap penyedia jasa akses internet disini dalam hal perbuatan pemblokiran yang seharusnya harus dilakukan oleh penyedia jasa internet yang akan diberikan sanksi dari pemerintah apabila melakukan pembiaran.

Selain itu peran dari Penyelenggara Jasa Internet (PJI) masih sangat minim kontribusi dan komitmen dalam memberantas internet negatif, hal ini dibuktikan sendiri apabila penulis membuka situs yang bermuatan konten negatif, maka akan dialihkan ke halaman Internet Positif sesuai dengan arahan kementerian komunikasi dan informasi (Kominfo) Indonesia. Namun, di halaman Internet Positif tersebut dipenuhi berbagai iklan dan telah membuat netizen di tanah air bertanya-tanya: “mengapa ada iklan?”<sup>27</sup>

Perlu dicatat bahwa Kementerian Kominfo telah memblokir ratusan ribu website bermuatan negatif. Beberapa diantaranya cukup aneh, bilang saja Vimeo dan Imgur juga ikut diblokir oleh Kominfo karena juga dianggap sebagai website pornografi, kemudian semua website itu akan secara otomatis mengalihkan trafik ke halaman Internet Positif yang dipenuhi iklan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, bayangkan seberapa banyak uang yang dihasilkan melalui iklan di Internet Positif setiap bulannya. Dan hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi mengapa Kominfo memperbolehkan iklan di halaman tersebut, dan ke mana uang tersebut dialirkan. Ada kemungkinan yang mendapatkan berkah dari semua ini ialah Telkom Indonesia selaku pemilik website Internet Positif. Saat klik tulisan “*advertise with us*” di bagian bawah halaman, Anda akan diarahkan untuk mengirimkan email kepada pihak Telkom untuk keperluan iklan.

---

<sup>27</sup> Enricko Lukman, *Internet Positif Masih Penuh Iklan*, <https://id.techinasia.com>, Diakses tanggal 5 Januari 2017

Apabila benar demikian, maka mengapa Kominfo memperbolehkan Telkom untuk meraup uang dari kegiatan pemblokiran internet. Tampaknya fungsi utama halaman Internet Positif ini ialah untuk kegiatan beriklan, hal ini dibuktikan dengan besarnya porsi ruang yang didedikasikan untuk menjual berbagai produk Telkom dibandingkan ruang untuk menyampaikan informasi mendidik kepada masyarakat. Dari fakta tersebut, penulis merasa bahwa komitmen dari Kementerian Kominfo selaku wakil pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika masih sangat meragukan.

## 2. Legitimasi Pemblokiran Internet Negatif

Internet negatif di sini adalah situs-situs yang digunakan sebagai wahana penjual untuk menunjukan produk atau layanannya di situs yang dimilikinya, sebagai salah satu proses transaksi yakni yang biasa disebut pengiklanan (*show*) sangat rentan digunakannya berbagai situs untuk itu. Legitimasi peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo harus diberikan secara masih tidak hanya tahapan pemblokiran yang telah dilakukannya saat ini dengan memberlakukan program internet positif, namun pasca pemblokiran harus selalu dipantau pembuatan situs-situs baru yang berisi konten-konten yang sama. Bahkan saat ini dengan menggunakan suatu program saja internet positif dapat dibuka kembali, dalam hal ini para pemblokiran hanya berdampak bagi calon-calon pembeli saja namun tidak terhadap situsnya keseluruhan karena apabila menggunakan id dari negara lain situs-situs yang digunakan oleh penjual untuk memasarkan obyek nya dapat selalu dibuka.

### 3. Pembentukan *System Big Data Cyber Security (BDCS)*

Globalisasi dan modernisasi memang memberikan dampak positif dan dampak negatif, dewasa ini masyarakat telah masuk dalam dunia maya yang segalanya telah ada di dalamnya, penggunaan secara dewasa maka tidak akan membawa dampak negatif darinya namun penggunaan yang secara sewenang-wenang dan tidak selayaknya akan menimbulkan berbagai akibat dari pada itu.

Big Data adalah sebuah teknologi baru di dunia teknologi informasi dimana memungkinkan proses pengolahan, penyimpanan dan analisis data dalam beragam bentuk/format, berjumlah besar dan penambahan data yang sangat cepat. Pengolahan dan analisis data dalam jumlah sangat besar ini memerlukan waktu yang relatif jauh lebih singkat dengan menggunakan Big Data.<sup>28</sup> Teknologi BDCS ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat saat ini, baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan. Teknologi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara.

Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan

---

<sup>28</sup> Suherman Aria, (*BDCS*) *Big Data Cyber Security Indonesia*, <https://suhermanariatambahilmu.wordpress.com>, Diakses tanggal 10 Januari 2017

dilakukan assessment yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam ketentuan pasal 31 ayat 1 UU ITE diatur mengenai larangan melakukan penyadapan yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”. Ketentuan mengenai penyadapan diperbolehkan untuk penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi penegak hukum lainnya yang diatur dalam pasal 31 ayat 3 UU ITE yang berbunyi: “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Pasal 40 UU Telekomunikasi juga mengatur larangan mengenai larangan penyadapan yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Apabila melanggar ketentuan ini akan dikenalkan pasal 56 UU Telekomunikasi yang berbunyi: “Barang siapa

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Dalam menjalankan penyadapan ini, Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian merupakan pihak yang berwenang, selain itu Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau *Provider* harus tetap menaati aturan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 42 ayat 1 UU Telekomunikasi yang berbunyi “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”. Kewenangan *Provider* dalam melakukan penyadapan berdasarkan atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 42 ayat 2 UU Telekomunikasi Yang berbunyi: “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas : a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ada yang mengatur mengenai perlindungan data atau informasi dan pembatasan penggunaannya, antara lain dalam UU ITE, UU telekomunikasi, UU keterbukaan informasi publik, UU perbankan dan UU perlindungan



konsumen. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen dalam hal pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak kebebasan berekspresi telah memberikan pembatasan dalam berbagai peraturan sebagai mana telah disebutkan di atas, namun dalam hak asasi manusia sendiri memunculkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya yang salah satunya adalah perlindungan terhadap berbagai aspek dalam jual beli dan masyarakat lainnya.

Program blokir internet negatif merupakan langkah awal pencegahan jual beli melalui internet dengan obyek yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun situs hanyalah tahapan pengiklanan dari suatu jual beli secara online<sup>29</sup>, masih ada tahapan order pembelian yang dilalui dengan berbagai cara yang marak saat ini adalah dengan cara pesan instan (BBM, WhatsApp, Line, dan lain-lain), penulis berasumsi bahwasannya upaya pemblokiran merupakan upaya tahap pertama dan harus diikuti dengan tahapan *cyber sosial media* melalui pesan instan, program BDSC akan mengambil alih berbagai berita yang bersifat negatif lainnya dalam hal ini proses jual beli secara online.

Pada dasarnya jual beli melalui internet (*e-commerce*) yang obyeknya melanggar ketentuan undang-undang ini antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memanfaatkan celah hukum untuk melakukan kegiatan transaksinya. Penggunaan Komunikasi privat dengan memanfaatkan pesan singkat atau *instant messaging* tidak mampu terlacak oleh pihak

---

<sup>29</sup> M. Suyanto, *Op.cit*, Hlm 46

Kementerian Kominfo, sehingga antara pihak penjual dan pembeli tetap bebas dan aman dalam melakukan transaksi yang obyeknya telah melanggar ketentuan undang-undang. Namun, dengan adanya BDCS nantinya diharapkan pengawasan pemerintah akan lebih akurat dan efisien dalam menangani masalah *e-commerce* yang obyeknya melanggar ketentuan undang-undang.

#### 4. Kerja sama dengan Pihak Kepolisian

Kerja sama antara Kementerian Kominfo dengan Kepolisian dalam mengelola dan mengantisipasi berbagai permasalahan keamanan di bidang komunikasi dan informatika secara lebih efektif. Hal tersebut agar terwujud tekad dan kesatuan langkah dalam rangka melakukan pengamanan secara menyeluruh dan terpadu serta penegakan hukum secara tegas, proporsional dan tidak diskriminatif terhadap segala bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utamanya.

Selain itu, kerjasama antara Kementerian Kominfo dan Kepolisian diharapkan mampu mengeliminir berbagai kejahatan di dunia maya, melalui tukar menukar informasi, peningkatan sumber daya manusia serta koordinasi dan dukungan dibidang operasional. Kementerian Kominfo harus menindak tegas para pelaku *e-commerce* yang tidak menaati ketentuan UU ITE, UU PSTE, UU Perdagangan dengan memblokir situs yang telah melanggar ketentuan undang-undang, serta Kepolisian harus menangkap para pelanggar *e-commerce*. Sehingga proses penegakan hukum akan

menjadi semakin efektif dalam rangka mewujudkan perlindungan maksimal bagi seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi serta memberikan efek jera kepada para pelaku usaha yang melanggar hukum dalam transaksi *e-commerce*.

